



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SURAKARTA

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KPU KOTA SURAKARTA

1. TUGAS

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Surakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Surakarta, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kota Surakarta terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Surakarta yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surakarta;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Surakarta kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. WEWENANG

Sedangkan wewenang KPU Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kota Surakarta;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota Surakarta berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kota Surakarta untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Surakarta dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, putusan Bawaslu Kota Surakarta, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KEWAJIBAN

KPU Kota Surakarta berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Surakarta dan lembaga kearsipan Kota Surakarta berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Surakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kota Surakarta dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Surakarta;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kota Surakarta;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kota Surakarta kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Surakarta;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM				
1.	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Surakarta kepada Publik	$\frac{\text{Jumlah tingkat kepuasan pelayanan publik secara baik}}{\text{Jumlah total pelayanan publik}} \times 100\%$	Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
2.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Surakarta	$\frac{\text{Jumlah rancangan keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat}}{\text{Jumlah total rancangan keputusan}} \times 100\%$	Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	$\frac{\text{Jumlah penyediaan logistik secara tepat dan akuntabel}}{\text{Jumlah total penyediaan logistik}} \times 100\%$	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
4.	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi	Persentase persiapan dan penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	$\frac{\text{Jumlah persiapan kegiatan tahapan yang sesuai jadwal}}{\text{Jumlah total persiapan kegiatan tahapan}} \times 100\%$	Divisi Teknis Penyelenggaraan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
5.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Nilai Indeks Reformasi</i>	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana kerja yang tersedia dengan baik}}{\text{Jumlah total sarana dan prasarana kerja}} \times 100\%$	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
8.	Meningkatnya akuntabilitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Surakarta	<i>Opini BPK</i>	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	keuangan dan kinerja KPU	<p>Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Surakarta</p> <p>Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p>	<p><i>Nilai evaluasi</i></p> <p>Nilai SAKIP KPU Kota Surakarta yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja</p> <p><i>Nilai Capaian IKPA</i></p>	<p>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi</p>
9.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	<p>Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Surakarta sesuai Ketentuan yang Berlaku</p>	$\frac{\text{Jumlah data pemilih yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah total data pemilih yang ditetapkan}} \times 100\%$	<p>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi</p>
		<p>Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif</p>	$\frac{\text{Jumlah data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif}}{\text{Jumlah total data pemilih berkelanjutan}} \times 100\%$	<p>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi</p>
10	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	<p>Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU Kota Surakarta</p>	$\frac{\text{Jumlah data dan sistem IT yang terintegrasi antar unit kerja}}{\text{Jumlah total data dan sistem IT}} \times 100\%$	<p>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi</p>

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM				
Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan				
1.	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan Pengelolaan logistik sesuai ketentuan dan tepat}}{\text{Jumlah total pelaksanaan pengelolaan logistik}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase penyusunan Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah penyusunan laporan logistik dengan baik}}{\text{Jumlah total penyusunan laporan logistik}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan				
1.	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang disusun dan ditetapkan dengan Tepat Waktu	<i>Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang disusun dan ditetapkan dengan Tepat Waktu</i>	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Persentase KPU Kota Surakarta dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	$\frac{\text{Jumlah informasi produk hukum yang disajikan secara tepat, cepat dan akurat}}{\text{Jumlah total informasi produk hukum}} \times 100\%$	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase KPU Kota Surakarta dalam mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah penyuluhan hukum yang didapat dengan baik}}{\text{Jumlah total penyuluhan hukum}} \times 100\%$	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Persentase KPU Kota Surakarta dalam melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan kebijakan regulasi tanpa sengketa hukum}}{\text{Jumlah total pelaksanaan kebijakan regulasi}} \times 100\%$	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
1.	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Surakarta dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah total lembaga yang terjalin fasilitasi kerjasama}}{\text{Jumlah total lembaga yang terjalin fasilitasi kerjasama}} \times 100\%$	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
2.	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kota Surakarta sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai den}}{\text{Jumlah total permohonan informasi data}} \times 100\%$	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	$\frac{\text{Jumlah sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan melalui media yang tersedia}}{\text{Jumlah total sosialisasi pendidikan pemilih}} \times 100\%$	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan				
1.	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase terfasilitasinya Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Surakarta secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang berlaku oleh KPU Kota Surakarta	$\frac{\text{Jumlah Proses PAW Anggota DPRD Kota Surakarta yang dapat selesai dalam waktu 5}}{\text{Jumlah total proses PAW Anggota DPRD Kota Surakarta}} \times 100\%$	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal				
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam Kegiatan Pendidikan Pemilih	$\frac{\text{Jumlah total lembaga yang terlibat Sosialisasi Pendidikan Pemilih}}{\text{Jumlah total lembaga yang terlibat Sosialisasi Pendidikan Pemilih}}$	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Marginal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	<i>Jumlah total pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih</i>	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
Pengelolaan Keuangan				
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	<i>Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu</i>	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<i>Jumlah total laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang diselesaikan secara tepat waktu</i>	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	$\frac{\text{Jumlah peningkatan kapasitas operator aplikasi sakti modul pelaporan}}{\text{Jumlah total operator aplikasi sakti modul pelaporan}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Tersusunnya formulasi	Jumlah kebijakan/regulasi/an	<i>Jumlah total kebijakan/regulasi/ analisis / kajian pengelolaan keuangan</i>	Subbag Keuangan,

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	alisis /kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Surakarta		Umum dan Logistik
4.	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu}}{\text{Jumlah total penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	$\frac{\text{Jumlah tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan}}{\text{Jumlah total kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Manajemen Perencanaan dan Organisasi				
1.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase perencanaan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total perencanaan program dan kegiatan}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
2.	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU Kota	<i>Jumlah total fasilitasi kerjasama</i>	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Surakarta		
3.	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Nilai Indeks Reformasi</i>	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Pelayanan Publik secara Baik	$\frac{\text{Jumlah tingkat pelayanan publik secara baik}}{\text{Jumlah total pelayanan publik}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	<i>Jumlah total Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</i>	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Pengelolaan Sumber Daya Manusia				
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapat layanan kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
2.	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota	Persentase Kota Surakarta yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PAW Anggota KPU sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah total pelaksanaan PAW Anggota KPU}} \times 100\%$	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku			
3.	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Surakarta yang Disediakan secara Valid dan Update	$\frac{\text{Jumlah dokumen pegawai yang disediakan secara valid dan update}}{\text{Jumlah total dokumen pegawai}} \times 100\%$	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	$\frac{\text{Jumlah kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai}}{\text{Jumlah total kualitas penyediaan dukungan sarana kerja}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Surakarta yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	$\frac{\text{Jumlah gedung dan gudang yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat}}{\text{Jumlah gedung dan gudang}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	$\frac{\text{Jumlah kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja}}{\text{Jumlah total layanan perkantoran}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Persentase Kualitas Tata Kelola	$\frac{\text{Jumlah kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip}}{\text{Jumlah total tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip}} \times 100\%$	Subbag Keuangan,

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Surakarta		Umum dan Logistik
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Surakarta	$\frac{\text{Jumlah kualitas layanan persidangan dan protokol}}{\text{Jumlah total layanan persidangan dan protokol}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Surakarta	$\frac{\text{Jumlah kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi pegawai}}{\text{Jumlah total layanan pemberian keamanan dan ketertiban}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Pemeriksaan Internal KPU				
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan internal terhadap realisasi anggaran}}{\text{Jumlah total nilai temuan hasil pemeriksaan internal}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK,	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK, BPKP, APIP}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti		
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Surakarta	<i>Opini BPK</i>	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	<i>Nilai Maturitas SPIP</i>	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara				
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa KPU Kota Surakarta dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan pengadaan tanpa ada kasus yang merugikan negara}}{\text{Jumlah total pelaksanaan pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang mater}}{\text{Jumlah total pengelolaan Barang Milik Negara}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	$\frac{\text{Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasar SIMAK BMN yang sesuai data SAK}}{\text{Jumlah total laporan Barang Milik Negara}} \times 100\%$	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Pengelolaan Data dan Informasi				
1.	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Persentase penyediaan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	$\frac{\text{Jumlah penyediaan data dan informasi pemilih yang mutakhir}}{\text{Jumlah total data dan informasi pemilih}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
2.	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase penerapan eGovernment sesuai SOP yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah penerapan eGovernment sesuai SOP yang berlaku}}{\text{Jumlah total penerapan eGovernment}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kota Surakarta yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana IT secara Memadai	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana IT secara memadai}}{\text{Jumlah total sarana dan prasarana IT}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia				
1.	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai di KPU Kota Surakarta yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sesuai dengan aturan yang berlaku dalam periode satu tahun		
Pendataan DPT Berkelanjutan				
1.	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan persiapan pendataan DPT Berkelanjutan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan persiapan pendataan DPT Berkelanjutan}}{\text{Jumlah total persiapan pendataan}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
2.	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah kegiatan fasilitasi pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait}}{\text{Jumlah total kegiatan}} \times 100\%$	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto